

**PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG
DINAS PERHUBUNGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	5
BAB II	6
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	6
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	6
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	8
BAB III	10
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	10
Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan	
SKPD	10
Pendapatan - LRA	10
Belanja	11
Pendapatan - LO	12
Beban	12
Aset	12
Kewajiban	26
Ekuitas Dana	28
Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD sebagai berikut :	28
BAB IV	30
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	30
BAB V	32
PENUTUP	32

BAB I

PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Perhubungan sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat

pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, secara sistematis terdiri dari:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
- BAB III : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
- BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
- BAB V : PENUTUP

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD:

No	Program/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	$5=4/3*100$
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	14.307.427.000	13.854.253.737	96,83%
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	653.000.000	633.151.345	96,96%
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	308.000.000	306.402.790	99,48%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	10.935.248.000	10.559.313.212	96,56%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	221.296.000	216.678.852	97,91%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	15.000.000	13.397.500	89,32%
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	272.592.000	242.195.362	88,85%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	166.296.000	161.799.652	97,30%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20.000.000	20.000.000	100%

	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	135.000.000	135.000.000	100%
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	510.500.000	506.585.018	99,23%
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	382.896.000	379.047.410	98,99%
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	188.155.000	188.155.000	100%
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	294.444.000	287.977.596	97,80%
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	205.000.000	204.550.000	99,78%
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.866.806.361	5.695.688.856	97,08%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.860.806.361	4.721.771.871	97,14%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	6.000.000	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.500.000	17.499.000	99,99%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	75.000.000	74.998.000	99,99%

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	14.978.000	99,85%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	29.598.000	98,66%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	5.985.000	99,75%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.500.000	59.153.522	82,73%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	410.000.000	395.687.290	96,51%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.000.000	82.588.219	97,16%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	275.000.000	272.429.954	99,07%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	15.000.000	100%
	JUMLAH BELANJA	20.174.233.361	19.549.942.593	96,91%

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan:

No	Sub Kegiatan	Hambatan dan Kendala
1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Nihil
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Nihil
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Nihil
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Nihil
5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Nihil
6	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Nihil
7	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Nihil

8	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Nihil
9	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Nihil
10	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Nihil
11	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Nihil
12	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Nihil
13	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Nihil
14	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Nihil
15	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nihil
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nihil
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nihil
18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nihil
19	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nihil
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nihil
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nihil
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nihil
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nihil
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nihil
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nihil
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nihil

Secara umum dalam pencapaian target kinerja kegiatan tidak mengalami hambatan dan kendala.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan – LRA

Pendapatan SKPD:

1. Pendapatan Retribusi Jasa Umum
2. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha
3. Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Jumlah Pendapatan Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022:

No	Nama Akun	Tahun Anggaran 2021		Tahun Anggaran 2022	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	Retribusi Jasa Umum	Rp 1.224.200.000	Rp 1.228.910.000	Rp 1.255.000.000	Rp 1.256.417.500
2	Retribusi Jasa Usaha	Rp 207.388.800	Rp 212.070.700	Rp 210.000.000	Rp 210.652.200
3	Retribusi Perizinan Tertentu	Rp 12.200.000	Rp 12.240.000	Rp 12.200.000	Rp 12.300.000
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 4.800.000	Rp 16.782.400	Rp 5.000.000	Rp 25.945.950
		Rp 1.448.588.800	Rp 1.470.003.100	Rp 1.482.200.000	Rp 1.505.315.650

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.505.315.650,- atau 101,56% dari anggarannya sebesar Rp.1.482.200.000,-

Realisasi Pendapatan tersebut diatas adalah merupakan pendapatan dari 6 jenis retribusi yaitu Parkir Di Tepi Jalan Umum, Pegujian Kendaraan Bermotor, Terminal, Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha, Parkir Khusus, Ijin Trayek serta Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Se – Kabupaten Temanggung dengan perincian sebagai berikut :

Pendapatan SKPD:

1. Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
2. Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Pendapatan Retribusi Terminal

4. Pendapatan Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
 5. Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir
 6. Pendapatan Retribusi Ijin Trayek
 7. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
- Jumlah Pendapatan Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022:

No	Nama Akun	Tahun Anggaran 2021		Tahun Anggaran 2022	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp 645.000.000	Rp 647.135.000	Rp 675.000.000	Rp 675.635.000
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp 579.200.000	Rp 581.775.000	Rp 580.000.000	Rp 580.782.500
3	Retribusi Terminal	Rp 182.388.800	Rp 186.520.700	Rp 160.000.000	Rp 185.102.200
4	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	Rp 0	Rp 0	Rp 25.000.000	Rp 0
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Rp 25.000.000	Rp 25.550.000	Rp 25.000.000	Rp 25.550.000
6	Retribusi Ijin Trayek	Rp 12.200.000	Rp 12.240.000	Rp 12.200.000	Rp 12.300.000
7	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp 4.800.000	Rp 16.782.400	Rp 5.000.000	Rp 25.945.950
		Rp 1.448.588.800	Rp 1.472.003.100	Rp 1.482.200.000	Rp 1.505.374.750

Terdapat target yang bukan merupakan usulan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, yaitu Pendapatan Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha pada tahun 2022 sebesar Rp 25.000.000,-. Pendapatan tersebut belum dapat direalisasikan karena belum ada dasar hukum serta penetapan pemungutan mengenai Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha yang terdapat pada Terminal Ngadirejo.

3.1.2. Belanja

3.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi :

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA. 2022 sebesar **Rp. 4.723.221.871,-** atau sebesar **97,14%** dari anggaran sebesar **Rp. 4.862.256.361,-**

b. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2022 sebesar **Rp. 13.440.587.208,-** atau sebesar **96,66%** dari anggaran sebesar **Rp. 13.904.351.000,-**

3.1.2.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA. 2022 sebesar **Rp.1.386.133.514,-** atau sebesar **98,47%** dari anggaran sebesar **Rp.1.407.626.000,-**

3.1.3. Pendapatan - LO

3.1.3.1 Pendapatan LO

Pendapatan LO sebesar Rp.1.505.315.650,- yang terdiri dari :

Retribusi Parkir di tepi jalan umum	675.635.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	580.782.500,00
Retribusi Terminal	185.102.200,00
Pelayanan Tempat Khusus Parkir	25.550.000,00
Pemberian Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum	12.300.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	25.945.950,00

3.1.4. Beban

3.1.4.1 Beban

Beban Daerah terdiri dari Beban Operasi dan Defisit Non Operasional dengan nilai total sebesar Rp. 18.111.406.894,- yang terinci sebagai berikut:

Beban operasi sebesar Rp. 18.111.406.894,- yang terdiri dari :

Beban Pegawai	Rp. 4.584.662.306
Beban Barang dan Jasa	Rp. 13.526.744.588

3.1.5. Aset

3.1.5.1 Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas

- a. Kas di Bendahara Pengeluaran
- b. Kas di Bendahara Penerimaan

Jumlah kas dan setara kas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022:

No	Kas dan Setara Kas	Tahun Anggaran 2021	Tahun Anggaran 2022
a	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. -	Rp. -
b	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp. -	Rp. -
		Rp. -	Rp. -

Kas dan Setara Kas sebesar Rp. 0,-

3.1.5.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,-

3.1.5.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,-

3.1.5.4 Piutang

Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 534.261.500,- yang terdiri dari

- Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp. 415.282.300,-
- Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp.118.860.200,-

sedangkan Penyisihan piutang senilai Rp. 534.142.500,-

Upaya tindak lanjut terkait penyelesaian piutang pada tahun 2023 adalah pengusulan untuk penghapusan piutang.

Penetapan retribusi parkir tepi jalan umum tahun 2022 sebesar Rp. 675.625.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 675.635.000. Terdapat kelebihan setor dari penetapan piutang sebesar Rp. 10.000,-. Adapun penjelasan dari kelebihan setor dimaksud adalah kelebihan setor juru parkir atas nama Sdr. Udiyono sebesar Rp. 10.000,-

3.1.5.5 Persediaan

Persediaan barang yang masih berada di Dinas Perhubungan sebesar Rp. 196.201.615,- dengan rincian saldo per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

NO.	Nama Barang	SISA BULAN INI		
		Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2	12	13	14
1	isi ballpoint biasa	4	2.500	10.000
2	isi staples kecil	4	4.000	16.000
3	amplop kop dinas kabinet kertas samson coklat tebal	80	2.000	160.000
4	amplop kop dinas kabinet kertas	50	1.000	50.000
5	tanda bukti pengeluaran (kwitansi dinas)	50	29.000	1.450.000
6	blanko ijin insidentil	10	47.500	475.000
7	cetak SKRD 1 Folio	30	59.500	1.785.000
8	karcis parkir	509	2.400	1.221.600
	karcis parkir	1.000	3.250	3.250.000
9	karcis retribusi terminal	201	2.400	482.400
	karcis retribusi terminal	1.198	2.500	2.995.000
10	laporan pendapatan uang retribusi terminal	5	33.000	165.000
11	belanja cetak tanda bukti lulus uji berkala (PNBP)	6.589	25.000	164.725.000

12	stopmap dinas	55	6.000	330.000
13	SKRD ½ folio	10	19.500	195.000
	SKRD ½ folio	7	25.000	175.000
14	kartu pengawasan mobil barang (KP)	450	700	315.000
15	sapu cemara	2	20.000	40.000
16	sapu lidi	2	15.000	30.000
17	kabel LVTC	800	12.278	9.822.400
18	lampu LED Bulp E27 30 watt warm white	1	141.570	141.570
19	MCB 4 A	11	92.565	1.018.215
20	MCB 6 A	4	92.565	370.260
21	baterai VRLA 12V 100A	2	2.928.750	5.857.500
22	stopping buckle	30	5.445	163.350
23	besi arde	15	38.115	571.725
24	kap lampu jalan/kap hijau	4	27.225	108.900
25	link	85	3.267	277.695
JUMLAH				196.201.615

3.1.5.6 Investasi Jangka Panjang

Investasi adalah asset yang dimaksudkan untuk memperoleh nilai ekonomik seperti bunga, deviden dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah melakukan investasi dengan beberapa alasan

antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

3.1.5.7 Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo aset tetap per 31 Desember 2022 tersaji sebagai berikut :

KO-DE	Nama Bidang Barang	Nilai Aset	MUTASI										Nilai Aset per 31 Desember 2022
		Neraca Awal 2022	BERTAMBAH					BERKURANG					Jumlah Harga (Rp)
		Jumlah Harga (Rp)	Belanja Modal	BOP	Dropping/ Antar OPD	Bukan Belanja Modal	JUMLAH BERTAMBAH	Tidak Masuk Aset (Pemeliharaan)	Penghapusan	Reklasifikasi Ektstrakomtabel	Reklasifikasi Perseidaan/ Pakai Habis	JUMLAH	
		63.954.119.820	1.386.133.514	47.143.000	12.030.000	86.247.275	1.531.553.789	188.155.000	10.235.000	85.900.000	53.204.000	337.494.000	65.148.179.609
A	TANAH	2.893.899.822											2.893.899.822
B	PERALATAN DAN MESIN	24.400.114.482	1.212.950.835	47.143.000	12.030.000		1.272.123.835	188.155.000	10.235.000	85.900.000	53.204.000	337.494.000	25.334.744.317
C	GEDUNG DAN BANGUNAN	9.388.799.460	173.182.679			86.247.275	259.429.954						9.648.229.414
D	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	27.236.439.556											27.236.439.556
E	ASET TETAP LAINNYA	66.500											66.500
F	KONSTRUKSI DALAM PENGERTAJAN	34.800.000											34.800.000
								Jumlah					65.148.179.609

Jumlah aset tetap TA. 2022 sebesar Rp. 65.148.179.609,- merupakan hasil mutasi dari belanja modal tahun 2022 (Neraca Awal) sampai dengan 2022 (Tahun Berjalan). Yang disajikan di Neraca adalah hasil dari jumlah Aset Tetap dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp.26.925.994.356,46 sehingga Saldo akhir aset tetap sesuai dengan Neraca sejumlah **Rp. 38.222.185.252,54** Saldo masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.1.5.7.1 Tanah.

Aset tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp 2.893.899.822,-

Adapun rincian aset Tanah per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

Tanah alas bangunan Kantor Belakang 4.800 m2	720.000.000
Tanah alas bangunan Kantor Depan 1.300 m2	195.000.000
Tanah alas bangunan Terminal Kerkop 3.548 m2	709.600.000
Tanah alas bangunan Terminal Kranggan 1.700 m2	350.000.000
Tanah alas bangunan Terminal Ngaren 2.000 m2	185.793.057
Tanah bekas bengkok 543 m2	67.800.000
Tanah alas bangunan 2.532 m2	59.700.000
Tanah Sub Terminal Maron 1.755 m2	606.006.765

3.1.5.7.2 Peralatan dan Mesin

Aset Peralatan dan Mesin per 1 Januari 2022 sebesar Rp 24.400.114.482,00. Pada tahun 2022 terdapat belanja modal yang menambah aset sebesar Rp. 1.212.950.853,00, BOP sebesar Rp 47.143.000,00 dan hibah dari OPD lain sebesar 12.030.000 yang terdiri dari:

BELANJA MODAL 2022

PERALATAN DAN MESIN	JUMLAH	KETERANGAN
Server Dell PE T 40 Include	25.000.000	belanja modal
Sound Level Tester	20.000.000	belanja modal
modul LED hijau 20 cm (3)	17.181.000	belanja modal
modul LED kuning 20 cm (3)	11.683.500	belanja modal
modul LED merah 20 cm (3)	11.683.500	belanja modal
rambu lalu lintas (10)	9.900.000	belanja modal
deleniator (70)	27.912.500	belanja modal
rambu RPPJ (2)	13.931.000	belanja modal
PJU Solar Cell AIO (All in One) Philips BRP110 LED50/757 G2	47.800.000	belanja modal
LPJU listrik lengan tunggal	552.322.045	belanja modal
kursi tunggu (5)	12.500.000	belanja modal
AC (2)	15.000.000	belanja modal
Flasher (4)	193.389.068	belanja modal
cermin tikungan	53.837.222	belanja modal
filter CO-HC tester	12.656.000	belanja modal
monitor display	188.155.000	belanja modal
JUMLAH	1.212.950.853	

BOP

NAMA BARANG	HARGA
LPJU listrik lengan tunggal	31.590.000
Flasher (4)	15.553.000
Jumlah	47.143.000

MUTASI DARI SATPOL PP

NAMA BARANG	HARGA
Sirine	7.800.000

DROPPING DARI DINPUSIP

NAMA BARANG	HARGA
Scanner	4.230.000

Adapun dari rincian belanja modal tersebut terdapat beberapa barang yang reklas menjadi barang persediaan berupa:

NO	NAMA BARANG	JUMLAH HARGA	KETERANGAN
1	Modul LED 20 cm hijau (3)	17.181.000	Pemeliharaan Traffic Light
2	Modul LED 20 cm kuning (3)	11.683.500	Pemeliharaan Traffic Light
3	Modul LED 20 cm merah (3)	11.683.500	Pemeliharaan Traffic Light
4	Filter CO-HC Tester	12.656.000	Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor
	Jumlah	53.204.000	

Adapun dari rincian belanja modal tersebut terdapat beberapa barang yang reklas menjadi barang ekstrakomptabel berupa:

NO	NAMA BARANG	JUMLAH HARGA
1	Stabilisator	200.000
2	Crimping Tolls	200.000
3	Meja Kerja Kayu	4.200.000
4	Crimping Tolls	1.125.000
5	Meja Kerja Kayu	500.000

6	Meja Kerja Pejabat Eselon III	500.000
7	Lampu	500.000
8	Kursi Putar	1.000.000
9	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	250.000
10	Jam Mekanis	300.000
11	Alat Khusus Keamanan Lainnya	300.000
12	Alat Khusus Keamanan Lainnya	300.000
13	Kursi Besi/Metal	330.000
14	Rambu Papan Tambahan	342.000
15	Rambu Papan Tambahan	342.000
16	Rambu Papan Tambahan	342.000
17	Rambu Papan Tambahan	342.000
18	Rambu Papan Tambahan	342.000
19	Rambu Papan Tambahan	342.000
20	Rambu Papan Tambahan	342.000
21	Rambu Papan Tambahan	342.000
22	Rambu Papan Tambahan	342.000
23	Rambu Papan Tambahan	342.000
24	Rambu Papan Tambahan	342.000
25	Lemari Kayu	350.000
26	Meja Tamu Biasa	700.000
27	Kursi Lipat	3.500.000
28	Rambu Jalan	353.000
29	Rambu Jalan	353.000
30	Rambu Jalan	353.000
31	Rambu Jalan	353.000
32	Kursi Rapat	6.339.000

33	Tabung Gas	380.000
34	Rambu Papan Tambahan	386.000
35	Rambu Papan Tambahan	386.000
36	Gerobak Dorong	2.730.000
37	Papan Pengumuman	400.000
38	Rak Kayu	1.600.000
39	Kursi Lipat	5.200.000
40	Kotak Surat	415.000
41	Kompor Gas (Alat Dapur)	420.000
42	Gordyin/Kray	8.730.000
43	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1.320.000
44	Kursi Fiber Glas/Plastik	1.800.000
45	Kursi Fiber Glas/Plastik	1.900.000
46	Teralis	33.925.000
47	Uninterruptible Power Supply (UPS)	480.000
	Jumlah	85.900.000

Adapun dari rincian belanja modal tersebut terdapat barang yang tidak termasuk aset (pemeliharaan) berupa:

NO	NAMA BARANG	JUMLAH HARGA	KETERANGAN
1	Monitor Display (TV Wall)	188.155.000	Pelunasan utang belanja tahun 2019

Pada tahun berjalan peralatan dan mesin mengalami penghapusan sebesar:

NO	NAMA BARANG	JUMLAH HARGA	KETERANGAN
1	Camera digital	1.445.000	Penghapusan Peralatan dan Mesin
2	Modem	490.000	Penghapusan Peralatan dan Mesin
3	Handy Talky (HT)	3.350.000	Penghapusan Peralatan dan Mesin
4	Handy Talky (HT)	4.950.000	Penghapusan Peralatan dan Mesin
	Jumlah	10.253.000	

Adapun rincian aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp25.334.744.317,- sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	JUMLAH HARGA
1	alat Besar	1.376.263.625
2	alat Angkutan	4.179.881.247
3	alat bengkel dan alat ukur	1.616.286.700
4	alat kantor dan rumah tangga	629.156.100
5	alat studio dan alat komunikasi	376.631.900
6	alat kedokteran dan kesehatan	2.033.500
7	alat laboratorium	2.327.650.500
8	komputer	537.370.730
9	alat keselamatan kerja	82.783.500
10	rambu – rambu	14.206.686.515
	Jumlah	25.334.744.317

3.1.5.7.3 Gedung dan Bangunan

Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Dinas Perhubungan per 1 Januari 2022 adalah Rp9.388.799.460,00 dan terdapat belanja modal dan bukan belanja modal yang menambah aset yang disajikan sebagai berikut.

Belanja Modal

No.	Nama	Jumlah harga
1	Garasi	Rp. 173.182.679

Bukan Belanja Modal

No.	Nama	Jumlah harga
1	Rehab Gedung Pengujian	Rp. 86.247.275

Adapun rincian aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 9.648.229.414,- sebagai berikut :

No.	Nama	Jumlah harga
1	Bangunan Gedung	8.636.807.840
2	Tugu titik kontrol/pasti	1.011.421.574

3.1.5.7.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pada neraca awal 2022, aset jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp. 27.236.439.556,-.

Adapun rincian aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

No.	Nama	Jumlah harga
1	Jalan dan Jembatan	1.531.915.125
2	Bangunan air	655.510.329
3	Instalasi	3.827.451.765
4	Jaringan	21.221.562.337

3.1.5.7.5 Aset Tetap Lainnya

Pada neraca awal 2022, aset tetap lainnya pada Dinas Perhubungan sebesar Rp 66.500,00 dan tidak ada penambahan sampai dengan 31 Desember 2022.

Adapun rincian aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah harga
1	Bahan Perpustakaan	66.500

3.1.5.7.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Pada neraca awal 2022, Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp 34.800.000,00 dan tidak ada penambahan sampai dengan 31 Desember 2022.

Adapun rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah harga
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	34.800.000

3.1.5.8 Asset Lainnya

Pada neraca awal 2022, aset lainnya pada Dinas Perhubungan sebesar Rp 628.427.716,00 dan pada tahun berjalan mengalami penghapusan sebesar Rp. 49.510.000,00 (software Go Publik) adapun rincian Asset Lainnya sebagai berikut :

No.	Nama	Jumlah harga
1	Aset Tidak Berwujud	117.876.900
2	Aset Lain-lain	461.040.816

terdapat Akumulasi Penyusutan sejumlah Rp564.183.103,50 maka sesuai dengan neraca akhir, jumlah Aset lainnya menjadi Rp14.734.612,50 setelah dikurangi Akumulasi penyusutan.

3.1.5.9 Barang Ekstrakompatabel

Barang ekstrakompatabel yang tercatat pada Laporan Mutasi Aset Dinas Perhubungan di awal tahun 2022 sebesar Rp. 24.004.966,00. Pada tahun berjalan mengalami penambahan aset reklas dari aset tetap peralatan dan mesin, berupa:

NO	NAMA BARANG	JUMLAH HARGA
1	Stabilisator	200.000
2	Crimping Tolls	200.000
3	Meja Kerja Kayu	4.200.000
4	Crimping Tolls	1.125.000
5	Meja Kerja Kayu	500.000
6	Meja Kerja Pejabat Eselon III	500.000
7	Lampu	500.000
8	Kursi Putar	1.000.000
9	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	250.000
10	Jam Mekanis	300.000
11	Alat Khusus Keamanan Lainnya	300.000
12	Alat Khusus Keamanan Lainnya	300.000
13	Kursi Besi/Metal	330.000
14	Rambu Papan Tambahan	342.000
15	Rambu Papan Tambahan	342.000
16	Rambu Papan Tambahan	342.000
17	Rambu Papan Tambahan	342.000
18	Rambu Papan Tambahan	342.000
19	Rambu Papan Tambahan	342.000
20	Rambu Papan Tambahan	342.000
21	Rambu Papan Tambahan	342.000
22	Rambu Papan Tambahan	342.000
23	Rambu Papan Tambahan	342.000
24	Rambu Papan Tambahan	342.000
25	Lemari Kayu	350.000
26	Meja Tamu Biasa	700.000
27	Kursi Lipat	3.500.000

28	Rambu Jalan	353.000
29	Rambu Jalan	353.000
30	Rambu Jalan	353.000
31	Rambu Jalan	353.000
32	Kursi Rapat	6.339.000
33	Tabung Gas	380.000
34	Rambu Papan Tambahan	386.000
35	Rambu Papan Tambahan	386.000
36	Gerobak Dorong	2.730.000
37	Papan Pengumuman	400.000
38	Rak Kayu	1.600.000
39	Kursi Lipat	5.200.000
40	Kotak Surat	415.000
41	Kompas Gas (Alat Dapur)	420.000
42	Gordyir/Kray	8.730.000
43	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1.320.000
44	Kursi Fiber Glas/Plastik	1.800.000
45	Kursi Fiber Glas/Plastik	1.900.000
46	Teralis	33.925.000
47	Uninterruptible Power Supply (UPS)	480.000
	Jumlah	85.900.000

Jumlah barang ekstrakomptabel setelah adanya reklas dari peralatan dan mesin ke barang ekstrakomptabel sebesar Rp 109.904.966,-.

3.1.6 Kewajiban

3.1.6.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 1.432.809.370,- yang terdiri dari:

1. Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp.192.232.083,-
 - Pengakuan Pendapatan di Muka tahun 2021 yang menjadi pendapatan LO tahun 2022 sebesar Rp. 182.372.083,- yang terdiri dari Pendapatan di Muka tahun 2021 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 179.027.083,- dan Pendapatan di Muka tahun 2021 Retribusi ijin Trayek sebesar Rp. 3.345.000,-
 - Pengakuan Pendapatan di Muka tahun 2022 sebesar Rp.192.232.083,- yang terdiri dari Pendapatan di Muka tahun 2022 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 188.462.083,- dan Pendapatan di Muka tahun 2022 Retribusi ijin Trayek sebesar Rp. 3.770.000,-
2. Utang Belanja sebesar Rp 1.240.577.287,- yang terdiri dari:
 - a. Utang Belanja Pegawai
 - Utang Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2022 sebesar Rp. 130.897.439,-
 - Utang Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Triwulan IV Tahun 2022 sebesar Rp. 72.610.000,-
 - b. Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 1.037.069.848,-
 - Utang Honor Pegawai Tidak Tetap bulan Desember 2022 sebesar Rp.105.300.000,-
 - Utang Belanja Jasa Kantor Telepon bulan Desember 2022 sebesar Rp. 74.431,-
 - Utang Belanja air Bulan Desember 2022 sebesar Rp. 856.500,-
 - Utang Belanja Listrik Bulan Desember 2022 sebesar Rp. 730.952,-
 - Utang Belanja Internet Bulan Desember 2022 sebesar Rp. 3.132.941,-
 - Utang Belanja Penerangan Jalan Umum Bulan Desember 2022 sebesar Rp. 926.975.024,-

3.1.6.2 Kewajiban Jangka Panjang
Nihil

3.1.7 Ekuitas Dana

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban yaitu sebesar Rp.37.000.431.110,04. Terdapat koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai
1	Mencatat mutasi aset atas sirine Tahun 2022 dari SATPOL PP	Rp 7.800.000,00
2	Mencatat penyusutan atas mutasi aset atas sirine Tahun 2022 dari SATPOL PP	(Rp 3.900.000,00)
3	Mencatat reklas aset peralatan dan mesin ke barang ekstrakomptabel	(Rp 85.900.000,00)
4	Mencatat penyusutan atas reklas aset peralatan dan mesin ke barang ekstrakomptabel	Rp 82.257.000,00
5	Mencatat koreksi atas penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp 1.507.896,75
6	Mencatat koreksi atas penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(Rp 47.154.429,92)
7	Mencatat koreksi atas penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp 11.759.282,07
8	Mencatat mutasi aset atas scanner dari Dinpusip	Rp 4.230.000,00
	JUMLAH	(Rp 29.400.251,10)

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD sebagai berikut :

- Reklas aset ke persediaan dari aset alat dan mesin berupa Modul LED Traffic Light ke persediaan alat listrik senilai Rp. 40.548.000,-
- Reklas aset peralatan dan mesin ke barang ekstrakomptabel senilai Rp. 85.900.000,-

- Reklas aset ke persediaan dari aset alat dan mesin berupa filter CO-HC ke persediaan kertas dan cover senilai 12.656.000,-
- Koreksi atas belanja modal monitor display (TV Wall) karena tidak masuk aset (pemeliharaan) senilai Rp 188.155.000,-
- Penghapusan aset berupa peralatan dan mesin senilai 10.235.000,-
- Penghapusan aset berupa Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud (software go public) senilai 49.510.000,-
- Pengakuan Pendapatan di Muka tahun 2021 yang menjadi pendapatan LO tahun 2022 sebesar Rp. 182.372.083,- yang terdiri dari Pendapatan di Muka tahun 2021 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 179.027.083,- dan Pendapatan di Muka tahun 2021 Retribusi ijin Trayek sebesar Rp. 3.345.000,-
- Pengakuan Pendapatan di Muka tahun 2022 sebesar Rp.192.232.083,- yang terdiri dari Pendapatan di Muka tahun 2022 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 188.462.083,- dan Pendapatan di Muka tahun 2022 Retribusi ijin Trayek sebesar Rp. 3.770.000,-
- Pendapatan Terdapat target yang bukan merupakan usulan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, yaitu Pendapatan Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha pada tahun 2022 sebesar Rp 25.000.000,-. Pendapatan tersebut belum dapat direalisasikan karena belum ada dasar hukum serta penetapan pemungutan mengenai Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha yang terdapat pada Terminal Ngadirejo.

BAB IV
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Adapun Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2021. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengelolaan Perhubungan;
- d. Bidang Sarana, Prasarana dan PJU;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, sampai bulan Desember 2022, dapat dirinci sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
Kondisi pegawai berdasarkan:			
1	Kualifikasi Pendidikan		
	a. SD	7	
	b. SMP	3	
	c. SMA	19	
	d. Diploma I-III	12	
	f. S-1 dan D-IV	7	
	g. S-2	4	
Jumlah		52	

2	Pangkat/Golongan		
	A Gol I	11	
	B Gol II	20	
	C Gol III	17	
	D Gol IV	4	
Jumlah		52	
3	Jabatan		
	A Eselon II	1	
	B Eselon III	3	
	C Eselon IV	6	
	D Eselon V	-	
	E Jabatan Fungsional Khusus	6	
	F Jabatan Fungsional Umum	35	
Jumlah		51	

Dari data tabel di atas rata-rata pegawai di Dinas Perhubungan didominasi dari lulusan SMA dengan kepangkatan golongan II dan III.

BAB V
PENUTUP

Demikian catatan atas laporan keuangan ini disajikan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, berupa laporan keuangan Tahun 2022.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



SUPRIANTO, AP., M.M.
Pemula Utama Muda
NIP. 19751128 199402 1 001